

**REKRUTMEN BAKAL CALON KEPALA DAERAH
PROVINSI RIAU OLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI
RIAU TAHUN 2013**

Eka Agustina Indriani
Email : Ekaindri82@gmail.com
Dibimbing oleh Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5
Simpang Baru Pekanbaru, 28293

Abstrack

Political Recruitment ensure continuity and sustainability of political party , as well as a way to recruit and train future leaders . There are various ways to do political recruitment , through personal contact , persuasion , or other means .

The purpose of this study was to determine compliance with the requirements given to the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) candidate Regional Head of Riau Province which will be supported and know the reason PKS in determining candidate Jon Erizal as Regional Head of Riau Province . The study was conducted in Pekanbaru , which is the key informants in this study is the Chairman of the Board of Regional Leadership (DPW) PKS Riau Province , General Secretary PKS Riau Province , Chairman of the Committee on Regional Election Campaign (KPPW) Executive Division of the Partai Amanat Nasional (PAN). In collecting the data obtained from the documentations and in-depth interview to the informant . Once the data is collected and analyzed using qualitative analysis. After research in recruiting candidates for regional head , PKS submit three (3) requirements that must be met by each candidate , namely : political support , financial support and social support .

In fulfillment of financial support , the PKS does not specify the amount of funds to candidates as rumored Regional Head outside , but PKS submitted a proposal containing the winning program. Of the five candidates were selected , PKS sets provide support to Jon Erizal to advance the election of Regional Head of Riau Province in 2013 .

Key Word: Political, Recruitment, Political Party

PENDAHULUAN

Pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau 4 September 2013 yang lalu, prosesnya sangatlah menarik. Para bakal calon tidak hanya diusung oleh satu partai politik saja tetapi juga diusung oleh koalisi partai. Hal ini tentu saja berpulang kembali pada pemenuhan syarat minimal pencalonan sebagaimana tertuang pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau No. 17/Kpts/KPU-Prov-004/I/2013, yang menyebutkan bahwa: KPU Provinsi menetapkan persyaratan paling sedikit 15% kursi atau 15% suara sah partai politik dengan keputusan KPU Provinsi sebelum pendaftaran bakal pasangan calon. Maka pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai politik mengacu pada Keputusan KPU Provinsi Riau No. 80/Kpts/KPU-Prov-004/III/2013, menetapkan jumlah kursi paling sedikit berjumlah 9 kursi atau paling sedikit 314.007 suara dari akumulasi perolehan suara sah partai politik peserta pemilu tahun 2009 lalu.

Pada pemilihan Kepala daerah Provinsi Riau tahun 2013 ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Sesuai dengan aturan dalam KPU yang menuntut sejumlah syarat untuk dapat maju sebagai kandidat, diantaranya dukungan 15 % kursi atau suara dalam hasil Pemilu Legislatif di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilu Legislatif tahun 2009. PKS hanya memiliki 5 kursi, PAN yang telah

mendukung Jon Erizal sebagai bakal calon Kepala Daerah Provinsi Riau datang dengan membawa 6 kursi, artinya jika kedua partai ini berkoalisi akan mencukupi dukungan politik yang telah ditentukan KPU.

Berbeda dengan kebanyakan partai politik lain yang mengusung kadernya sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. PKS justru memilih untuk mendukung calon di luar kader, tidak seperti pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) biasanya yang menurunkan kadernya sebagai Kepala Daerah ataupun Wakil. Ini merupakan salah satu pertanyaan yang muncul dari banyak kalangan, terutama mereka yang selama ini menjadi pemilih PKS di pemilu 2009 yang lalu. PKS menjadi partai pertama yang mendukung calon di luar kader ini.

Adapun syarat atau kriteria yang ditetapkan oleh PKS adalah mereka harus memiliki :

1. Dukungan Politik

Dukungan politik penting adanya karena akan dapat memenuhi kekurangan suara PKS untuk mengusung satu pasangan calon.

2. Dukungan Finansial

Dukungan finansial atau dukungan keuangan tak dapat dipungkiri sangat berpengaruh terhadap kinerja tim dalam pemenangan calon yang akan diusung nantinya, karena untuk melakukan kampanye memerlukan dana yang tidak sedikit.

3. Dukungan Sosial

Dukungan sosial berdasarkan pengalaman pribadi calon yang akan didukung nantinya apakah pernah

tersandung masalah hukum dan bagaimana hubungan dengan masyarakat terjalin baik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menetapkan untuk mendukung Jon Erizal yang merupakan bendahara umum Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai bakal calon Kepala Daerah yang bersaing di pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Riau. Jon Erizal yang merupakan wajah baru perpolitikan Riau. Dikatakan wajah baru karena Jon Erizal bukan merupakan seorang politisi atau birokrat yang berkarir di Riau. Dia berangkat dari seorang pengusaha muda yang kemudian terjun ke politik sebagai bendahara umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN. Jon Erizal bukanlah orang yang memiliki pengalaman di pemerintahan Provinsi Riau. Jon Erizal selama ini berdomisili di Jakarta, warga kelahiran Bengkalis ini duduk sebagai bendahara umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan merupakan seorang pengusaha. Selama ini Jon Erizal lebih banyak berkiprah dikancah perpolitikan nasional.

Sebagai seorang bakal calon Kepala Daerah ketokohan Jon Erizal masih sangat jauh dari ideal, populeritas Jon Erizal sendiri sangatlah rendah dibandingkan dengan calon-calon lainnya. Populeritas Jon saat akan didukung oleh PKS adalah sekitar dibawah 3%. Itu sangatlah rendah, diibaratkan dari 100 orang yang ada di Pekanbaru hanya kurang dari 3 orang yang mengenal sosok Jon Erizal ini.

Berdasarkan hasil polling yang dilakukan oleh surat kabar Riau Pos

pada hari Kamis tanggal 15 November 2012, Achmad dan Mambang Mit merupakan bakal calon Kepala Daerah Provinsi Riau yang mendapat dukungan tertinggi. Dalam rentang tiga hari Achmad mengumpulkan suara sebanyak 10.008 kupon aspirasi dan Mambang Mit sebanyak 10.006 kupon aspirasi dari jumlah seluruh suara yang masuk 21.167. Hasil ini menunjukkan bahwa Jon Erizal bukanlah calon Kepala Daerah yang dapat diunggulkan.

Banyak tersiar kabar terpilihnya Jon Erizal ini adalah dikarenakan ia menyanggupi permintaan uang yang diajukan oleh PKS, sedangkan secara teoritik permintaan uang tidak baik, oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana proses **Rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah Provinsi Riau Oleh Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013.**

METODE PENELITIAN

Adapun data yang digunakan adalah:

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau pihak yang berangkutan terhadap masalah penelitian, berupa informasi tentang rukretmen politik Partai Keadilan Sejahtera dalam menyeleksi lima calon menetapkan Jon Erizal sebagai bakal calon Kepala Daerah Provinsi Riau, berupa profil PKS Provinsi Riau dan profil-profil bakal calon Kepala Daerah Provinsi Riau.

b. Data yang diperoleh melalui sumber lain secara tidak langsung, dari dokumen, buku-buku atau hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*), yaitu dengan menentukan siapa responden yang akan diwawancarai (Deddy Mulyana, 2008:187).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Maleong, 1993: 135).

b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dari intansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti.

Analisa data yang penulis gunakan adalah kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman dalam Hamid Patilima (2011:100) hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian

berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Persyaratan Yang Diberikan Partai Keadilan Sosial (PKS) Kepada Bakal Calon Kepala Daerah Provinsi Riau

Mekanisme dan tata cara setiap tahapan pemilihan Kepala Daerah, mulai pendataan dan pendaftaran calon pemilih, sistem pemilihan, dan penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah oleh partai politik, persyaratan calon (aspek normatif, sosial, dan profesional), tata cara pemungutan suara, pengumuman hasil pemungutan suara dan penetapan hasil pemungutan suara serta penetapan calon terpilih. Dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2013, masyarakat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Dalam proses pengerucutan bakal calon Kepala Daerah yang diusung PKS, dari 14 calon yang diusung dan menjalin komunikasi politik, akhirnya PKS memutuskan 5 nama bakal calon yang kemungkinan diusung oleh PKS yang kemudian diajukan oleh DPW PKS PROVINSI RIAU kepada DPP PKS. Kelima nama yang diajukan PKS sebagai bakal calon Kepala Daerah yang akan diusung PKS adalah Annas Maamun, Lukman Edi, Aziz Zainal, Jon Erizal dan Syamsurizal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Sekretaris umum DPW PKS RIAU, Suroyo, dapat dipaparkan

mengenai pemenuhan kriteria yang diinginkan PKS terhadap kondisi yang dimiliki oleh masing-masing bakal calon Kepala Daerah Provinsi Riau yang akan diusung oleh PKS yaitu:

1. Dukungan Politik

a. Anas Maamun

Anas Maamun merupakan kader dari partai Golkar. Dari penjumlahan total jumlah suara yang dimiliki Golkar dan PKS cukup memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh KPU. Namun, pada saat dikonfirmasi PKS terhadap Anas Maamun, Golkar belum memutuskan bakal calon Kepala Daerah yang akan diusung.

“Golkar yang memiliki 15 kursi jika digabungkan dengan jumlah kursi yang dimiliki PKS tentu saja akan dapat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh PKS, namun pada saat PKS menanyakan kepada Annas Maamun beliau menjawab Golkar belum menentukan siapa bakal calon Kepala Daerah yang akan maju pada pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

b. Lukman Edy

Lukman Edy merupakan kader dan bakal calon yang diusung PKB. Kursi yang dimiliki PKB hanya 3 kursi. Jadi total kursi yang dimiliki PKB dan PKS hanya berjumlah 8 kursi, jika ingin berkoalisi masih kurang satu kursi lagi, dengan kata lain belum memenuhi persyaratan dari KPU.

“PKS menghubungi PKB yang telah menetapkan untuk mendukung Lukman Edi sebagai bakal calon

Kepala Daerah yang akan maju pada pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Riau nanti. Namun dari total jumlah kursi yang dimiliki oleh PKS dan PKB masih belum memenuhi syarat yang diajukan KPU. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

c. Azis Zaenal

Azis Zaenal merupakan kader dan bakal calon yang akan diusung oleh PPP. Kursi yang dimiliki PPP sebanyak 6 kursi dan memenuhi syarat KPU jika ditotalkan dengan jumlah kursi yang dimiliki PKS. Namun, disisi lain, Azis Zaenal lebih memilih berpasangan dengan Indra Mukhlis sebagai Bakal calon Wakil Kepala Daerah yang kemungkinan diusung oleh Golkar.

“Azis Zainal merupakan bakal calon Kepala Daerah yang akan diusung oleh PPP. Kursi yang dimiliki PPP jika dijumlahkan dengan kursi yang dimiliki PKS akan mencukupi persyaratan yang diajukan oleh KPU. Namun disisi lain, Azis Zaenal lebih memilih untuk berpasangan dengan Indra Mukhlis sebagai bakal calon Wakil Kepala Daerah yang kemungkinan diusung oleh Golkar. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

d. Syamsurizal

Dukungan politik terhadap Syamsurizal belum jelas, disebabkan karena posisi Syamsurizal antara punya partai pendukung atau tidak. Namun ia berjanji akan membeli partai untuk menutupi kekurangan

kursi yang dimiliki PKS guna memenuhi persyaratan yang ada.

“Mengenai dukungan politik yang dimiliki oleh Syamsurizal masih belum jelas, karena Syamsurizal belum memiliki partai pendukung yang jelas, namun ia berjanji kepada kami akan membeli partai pendukung untuk menutupi kekurangan kursi yang dimiliki PKS agar dapat memenuhi persyaratan dari KPU. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

e. Jon Erizal

Jon Erizal merupakan bakal calon Kepala Daerah yang didukung oleh PAN. Kursi yang dimiliki oleh PAN ada sebanyak 6 kursi, jika digabung dengan jumlah kursi yang dimiliki PKS adalah berjumlah 11 kursi, dapat memenuhi syarat yang diberikan KPU yakni 9 kursi.

“Jon Erizal yang mendapat dukungan dari partainya yakni PAN yang memiliki kursi sebanyak 6 kursi dapat menutupi kekurangan kursi yang dimiliki PKS, dan memenuhi syarat yang diberikan KPU. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan persyaratan dukungan politik merupakan hal yang penting. Dukungan politik merupakan modal awal bagi bakal calon untuk maju pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2013. PKS yang memiliki 5 kursi membutuhkan 4 kursi lagi untuk dapat mengajukan

satu pasang calon, untuk itu PKS memilih bakal calon yang dapat menutupi kekurangan kursi yang dimiliki PKS. Jon Erizal dan Aziz Zaenal merupakan bakal calon yang memenuhi dukungan politik dengan jumlah 6 kursi.

2. Dukungan Finansial

a. Anas Maamun

PKS memiliki proposal yang berisikan program pemenangan calon kandidat yang akan diusung oleh PKS. Pada saat PKS menawarkan proposal program pemenangan kepada pihak Anas Maamun, Anas Maamun menolaknya dan lebih memilih memberikan 2 milyar kepada DPP PKS agar mengeluarkan surat keputusan untuk mendukung dirinya.

“Pada saat PKS menemui Annas Maamun dan memberikan proposal yang berisikan program pemenangan bakal calon kandidat yang akan PKS usung untuk maju pada pemilihan umum Kepala Daerah, pihak Annas Maamun menolak proposal yang kami ajukan, dan menawarkan 2 milyar untuk diberikan kepada DPP PKS agar mengeluarkan surat keputusan mendukung dirinya. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

b. Lukman Edy

Sama halnya dengan bakal calon Kepala Daerah yang lain. PKS juga mengajukan proposal yang berisikan program pemenangan calon kandidat kepada Lukman Edy. Setelah dilakukan komunikasi, pihak Lukman Edy setuju dengan proposal program pemenangan namun tidak menyebutkan besaran dana yang

akan diberikan, dan dana pemenangan tersebut ditanggung bersama, setengah dari PKS setengah dari PKB.

“PKS mengajukan proposal yang sama kepada Lukman Edy, pihak Lukman Edy tidak keberatan dengan isi program pemenangan yang diajukan PKS, mengenai dana Lukman Edy tidak menyebutkan besarnya berapa dan jika terjalin koalisi dana tersebut akan ditanggung bersama, setengah dari PKS dan setengah dari PKB. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

c. Azis Zaenal

Azis Zaenal menanggapi dengan baik proposal program pemenangan yang diajukan PKS dan setelah melakukan diskusi bersama, Azis Zaenal tidak merubah isi program dan mengatakan hanya sanggup memberi 10 milyar untuk dana pemenangan. Namun pada saat diminta untuk datang ke DPP PKS, Azis Zaenal tidak datang.

“Mengenai dukungan finansial dari Azis Zaenal tidak ada masalah, Azis Zaenal menanggapi dengan baik proposal pemenangan yang PKS ajukan. Mengenai dana Azis Zaenal memberikan 10 milyar untuk biaya program pemenangan yang sebagaimana diajukan PKS. namun pada saat diminta untuk datang ke DPP PKS, Azis Zaenal tidak datang. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

d. Syamsurizal

Syamsurizal yang dihubungi oleh PKS bersedia memenuhi persyaratan finansial yang diajukan oleh PKS. Syamsurizal tidak keberatan dengan isi proposal program pemenangan calon Kepala Daerah tersebut, ia akan memberikan 15 milyar sebagai dana pemenangannya.

“Syamsurizal berjanji akan memenuhi semua isi proposal pemenangan yang PKS ajukan, ia tidak keberatan dengan isi proposal program pemenangan tersebut, ia akan memberikan 15 milyar sebagai dana pemenangan karena Syamsurizal mengerti untuk maju menjadi calon Kepala Daerah memerlukan modal yang tidak sedikit. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

e. Jon Erizal

PKS menawarkan proposal yang berisikan program pemenangan kepada Jon Erizal. Setelah melakukan diskusi bersama, Jon Erizal akan memberikan dana pemenangan tersebut sebesar 15 milyar, dengan ketentuan setengah (7milyar) diberikan dimuka dan sisanya akan diberikan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

“Jon Erizal tidak keberatan dengan isi proposal program pemenangan yang PKS ajukan, setelah melakukan diskusi bersama, Jon Erizal akan memberikan dana pemenangan sebesar 15 milyar, dengan ketentuan dana tersebut setengah akan diberikan dimuka dan sisanya akan diberikan secara bertahap sesuai kesepakatan. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21

Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

Pada persyaratan dukungan finansial, PKS mengajukan proposal yang berisikan program pemenangan bakal calon Kepala Daerah. Dalam pemenuhan dukungan finansial Jon Erizal mampu memberikan 15 milyar, Syamsurizal mampu memberikan 15 milyar, dan Azis Zaenal mampu memberikan 10 milyar. Sementara Anas Maamun dan Lukman Edy tidak menyebutkan berapa dana yang akan mereka berikan. Dukungan finansial berupa dana dibutuhkan untuk menjalankan program pemenangan pada proposal yang diajukan PKS.

3. Dukungan Sosial

a. Anas Maamun

Annas Maamun memiliki dukungan sosial yang baik dengan masyarakat. Annas Maamun memiliki citra positif dipandangan masyarakat Riau khususnya masyarakat Rokan Hilir (Rohil).

“PKS melihat Annas Maamun memiliki dukungan sosial yang baik, Annas dilihat dekat dengan masyarakat tempat dia memimpin, Annas juga tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum, dia memiliki citra yang positif dimasyarakat. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB).”

b. Lukman Edy

Sebagai seorang tokoh yang masih muda, Lukman Edy dapat dikatakan berprestasi karena pernah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal pada masa Kabinet Indonesia jilid pertama.

Lukman Edy juga tidak ada tersandung masalah hukum. Hanya saja pengurus DPW PKS Provinsi Riau kurang menyukai sikap Lukman Edy yang langsung meminta dukungan DPP PKS terhadap dirinya.

“ PKS melihat Lukman Edy adalah tokoh muda yang memiliki prestasi di tingkat nasional dengan pernah menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia jilid pertama, dia juga bersih dari masalah hukum. Namun PKS menilai Lukman Edy melangkahi DPW PKS Provinsi Riau dengan langsung meminta dukungan DPP PKS. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

c. Azis Zaenal

Azis Zaenal merupakan anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Selain itu Azis Zaenal juga merupakan seorang pengusaha yang sukses. Kehidupan rumah tangganya baik, ia juga tidak pernah tersangkut masalah hukum.

“Dukungan sosial yang dimiliki Azis Zaenal dinilai PKS baik, karena Azis Zaenal yang merupakan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Riau memiliki kehidupan rumah tangga yang baik dan ia juga seorang pengusaha sukses yang tidak pernah tersangkut masalah hukum. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

d. Syamsurizal

Syamsurizal pernah menjabat sebagai Bupati Bengkalis selama dua periode. Beliau juga pernah ditunjuk

sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru menggantikan Herman Abdullah yang mengakhiri masa tugasnya. Selain itu Syamsurizal pernah menjadi Ketua Harian Pengurus Besar Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke XVIII di Provinsi Riau. Nama baik Syamsurizal tercoreng karena diduga terkait kasus dugaan korupsi PON di Riau.

“Pengalaman politik Syamsurizal sudah banyak, ia pernah menjadi Bupati Bengkalis selama dua periode, pernah ditunjuk sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru, dan menjadi Ketua Harian Pengurus Besar PON, namun adanya isu keterkaitan Syamsurizal dengan kasus dugaan korupsi PON membuat PKS lebih selektif dalam menilai Syamsurizal. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB”.

e. Jon Erizal

Jon Erizal merupakan tokoh muda yang memiliki pengalaman sebagai pengusaha nasional. Ia juga merupakan Bendahara Umum DPP PAN dan dekat dengan Hatta Rajassa. Jon Erizal tidak memiliki masalah dengan hukum.

“PKS melihat sosok Jon Erizal sebagai tokoh muda yang memiliki prestasi, selain ia merupakan pengusaha nasional, Jon Erizal juga dipercaya oleh Hatta Rajassa sebagai Bendahara Umum DPP PAN. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahawa dukungan sosial

yang harus dimiliki oleh bakal calon Kepala Daerah adalah setiap bakal calon memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, berprestasi dan bersih dari masalah hukum.

Setelah terus melakukan komunikasi politik terhadap 5 bakal calon Kepala Daerah yang akan didukung oleh PKS dan mengajukan persyaratan-persyaratan kepada bakal calon Kepala Daerah, maka rapat DPW PKS Provinsi Riau memutuskan untuk mengkerucutkan 5 nama bakal calon Kepala Daerah tersebut menjadi 2 nama. Berdasarkan rapat DPTW PKS RIAU dan surat nomor 31/AD-PKS/IX/1433 kepada DPP PKS PUSAT, DPW PKS PROVINSI RIAU mengusulkan 2 orang untuk ditetapkan sebagai bakal calon Gubernur Riau yaitu Syamsurizal dan Jon Erizal.

Tahapan terakhir yang akan PKS lakukan adalah menilai bagaimana karakter dari kedua bakal calon Kepala Daerah yang akan didukung. Dari kedua nama bakal calon yang ada tersebut, PKS melakukan seleksi dan penyesuaian pemenuhan kriteria yang sesuai dengan visi dan misi PKS. Setelah melalui penilaian karakter, Syamsurizal tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh PKS. Akhirnya PKS memutuskan Jon Erizal sebagai bakal calon yang akan diusung menjadi bakal calon Kepala Daerah Provinsi Riau dari PKS, terlampir dalam surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera nomor 016/SKEP/DPP-PKS/1433 tentang bakal calon Gubernur Provinsi Riau tahun 2013-2018.

B. Alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menetapkan Jon Erizal Sebagai Bakal Calon Kepala Daerah Provinsi Riau

Sebelum menetapkan bakal calon Kepala Daerah Provinsi Riau, PKS telah melakukan proses penyeleksian terhadap beberapa bakal calon. Akhirnya PKS menetapkan Jon Erizal sebagai bakal calon yang akan maju dalam pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2013. Alasan PKS menetapkan Jon Erizal sebagai Kepala Daerah adalah:

1. Nama Jon Erizal Sering Keluar di Media Cetak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Umum PKS, dalam menentukan nama bakal calon Kepala Daerah, PKS menerima masukan dari tiga sumber yaitu, media cetak, kader PKS, bakal calon yang menghubungi PKS.

“PKS menghubungi bakal calon Kepala Daerah ini karena adanya masukan dari kader PKS, surat kabar, dan bakal calon Kepala Daerah yang menghubungi PKS. (wawancara dengan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurdin, 16 Oktober 2014 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB).”

Dalam media Riau terkini, 1 Maret 2012 memuat sejumlah tokoh yang akan maju sebagai bakal calon pada pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Riau 2013, diantaranya adalah Jon Erizal, Mambang Mit, Yopi Arianto, Indra Mukhlis, Herman Abdullah, Annas Maamun, Wan Abu Bakar, Azis Zaenal, dan Ahmad. Kemunculan nama sejumlah tokoh ini kemediia merupakan salah

satu masukan bagi PKS untuk mulai membangun komunikasi dengan bakal calon Kepala Daerah tersebut.

2. Jon Erizal Memenuhi Semua Persyaratan yang Diajukan oleh PKS
Setiap bakal calon Kepala Daerah yang akan diusung PKS harus memenuhi kriteria yang diinginkan oleh PKS. Kriteria calon Kepala Daerah merupakan syarat normatif dalam pemilihan bakal calon Kepala Daerah Provinsi Riau oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pengajuan syarat tersebut berupa dukungan politik, dukungan finansial dan dukungan sosial.

a. Dukungan Politik

Dukungan politik penting adanya karena akan dapat memenuhi kekurangan suara PKS untuk mengusung satu pasangan calon. Syarat yang diajukan KPU berupa penetapan sedikitnya sembilan kursi di DPR untuk masing-masing calon kandidat. Sementara PKS hanya memiliki lima kursi di DPR, itulah sebabnya PKS memilih untuk mengusung bakal calon Kepala Daerah Provinsi Riau diluar kader partainya sendiri.

Seperti yang disampaikan Sekretaris Umum PKS Bapak Suroyo, ia mengatakan:

“Karena PKS hanya memiliki lima kursi tidak mungkin untuk mencalonkan kadernya sendiri sebagai calon Kepala Daerah, dalam keputusan yang telah diberikan oleh KPU setidaknya masing-masing calon Kepala Daerah harus memiliki sembilan kursi . Untuk memenuhi syarat tersebut PKS memutuskan untuk mendukung calon kandidat yang dapat menutupi kekurangan dari jumlah kursi yang dimiliki oleh PKS. (wawancara dengan Sekretaris

Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

Senada dengan itu Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) Bidang Eksekutif PAN Riau, Bapak Zulmizan mengatakan:

“PAN yang akan mengusung salah satu kadernya menjadi calon Kepala Daerah Provinsi Riau tentu saja juga membutuhkan dukungan politik dari partai lain guna memenuhi persyaratan yang diberikan KPU berupa minimal harus memiliki sembilan kursi untuk mengusung satu nama calon kandidat Kepala Daerah, sementara PAN hanya memiliki enam kursi. Untuk itu PAN bersedia berkoalisi dengan PKS di pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau nantinya. (wawancara dengan Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) Bidang Eksekutif PAN Riau Zulmizan, 7 Juni 2014 di resto Hotel Pangeran Pekanbaru, 16.00 WIB)”

Dari jumlah kursi yang dimiliki PKS dan PAN jika digabungkan akan berjumlah 11 kursi dan cukup untuk memenuhi syarat yang diberikan KPU. Sementara itu dibanding dengan bakal calon Kepala Daerah lain seperti Annas Maamun yang belum mendapat kepastian akan didukung oleh Partai Golkar. Seperti yang disampaikan oleh Suroyo, beliau mengatakan:

“Golkar yang memiliki 15 kursi jika digabungkan dengan jumlah kursi yang dimiliki PKS tentu saja akan dapat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh PKS, namun pada saat PKS menanyakan kepada Annas Maamun beliau menjawab Golkar belum menentukan siapa bakal calon

Kepala Daerah yang akan maju pada pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

Belum jelasnya partai pendukung Annas Maamun ini yang membuat PKS lebih menjatuhkan pilihan kepada Jon Erizal yang sudah jelas mendapat dukungan dari PAN yang memiliki enam kursi dan dapat maju bersama PKS pada pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2013.

b. Dukungan Finansial

Dukungan finansial merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap kinerja tim dalam pemenangan calon yang akan diusung nantinya, karena untuk melakukan kampanye memerlukan dana yang tidak sedikit.

Ditemui di kantor Markas Dakwah DPW PKS Riau, Suroyo menjelaskan bahwa:

“Dukungan finansial yang diajukan PKS sebagai salah satu syarat merupakan modal awal yang nantinya akan dipergunakan untuk membangun struktur-struktur PKS. Pada saat tahun 2009 yang lalu struktur PKS di desa hanya 30%, di kecamatan 75% hal ini menyebabkan PKS belum maksimal dalam perolehan suara pada pemilu saat itu, untuk itu dana yang diajukan sebagai syarat dukungan finansial dipergunakan untuk membangun struktur PKS agar di setiap desa menjadi 100% begitu juga di setiap kecamatan menjadi 100%. Selain

untuk membangun struktur dana tersebut juga akan dipergunakan untuk membina saksi-saksi yang akan ditempatkan di setiap tempat pemungutan suara (TPS), ini bertujuan agar mereka (saksi) dapat melihat secara jelas apakah ada kecurangan dalam pemungutan suara nanti. Setelah struktur PKS terbangun dengan baik, dari sinilah tim pemenangan akan dapat bekerja secara optimal demi kemenangan calon gubernur nantinya". (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB).

Dari kondisi yang disampaikan Sekretaris Umum PKS diatas, maka PKS memberikan syarat adanya dukungan finansial dari calon Gubernur yang akan diusung nantinya. Menanggapi permintaan PKS tersebut, Bapak Zulmizan selaku Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) Bidang Eksekutif PAN Riau menanggapi bahwa:

" Kami sebagai partai yang berminat mencalonkan diri atau yang dicalon PKS berusaha untuk memenuhi segala syarat yang diajukan PKS. Termasuk pemenuhan syarat finansial yang diajukan PKS berupa proposal pemenangan, setelah kami cermati dan didiskusikan oleh kedua belah pihak, mengenai kebutuhan-kebutuhan pemenangan bisa dikatakan cost politic (harga politik) yang harus dikeluarkan, seperti biaya untuk bayar saksi, beli logistik bukan money politik membeli partai lain, kami sepakat untuk melakukan koalisi dengan PKS. (wawancara

dengan Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) Bidang Eksekutif PAN Riau Zulmizan, 7 Juni 2014 di resto Hotel Pangeran Pekanbaru, 16.00 WIB)"

Dalam pemenuhan dukungan finansial, Jon Erizal setuju dengan pengajuan proposal pemenangan bakal calon Kepala Daerah yang diajukan oleh PKS. Berbeda dengan Annas Maamun dan Lukman Edi yang menolak dan tidak menanggapi proposal yang diajukan oleh PKS.

c. Dukungan Sosial

Dukungan sosial dapat berupa pemberian informasi, bantuan tingkah laku, ataupun materi yang didapat dari hubungan sosial akrab yang dapat membuat individu merasa diperhatikan, bernilai, dan dicintai. Dukungan Sosial lebih melihat bagaimana masing-masing kandidat di mata masyarakat. Yang mana disampaikan Suroyo selaku Sekretaris Umum PKS, bahwa:

"Masyarakat saat ini sudah sangat cerdas dalam memilih dan menentukan siapa calon pemimpinnya, tentu saja masyarakat ingin pemimpin yang baik, ramah, berwibawa, pintar serta tidak haya mengumbar janji semata, dan juga masyarakat ingin pemimpin yang bersih tidak pernah tersangkut masalah hukum seperti korupsi dan penipuan". (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB).

Syarat normatif yang ke tiga adalah adanya dukungan sosial. Menanggapi hal ini Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) Bidang

Eksekutif PAN Riau Zulmizan, menjelaskan:

“Calon yang kami usung, bang Jon Erizal ini adalah salah satu putra daerah yang bisa dikatakan berhasil sebagai pengusaha nasional dan juga politisi muda yang bisa menduduki jabatan sebagai bendahara umum PAN, dan merupakan satu-satunya orang Riau yang berhasil menduduki jabatan tersebut. Selain itu Jon Erizal ini tidak ada tersandung masalah hukum seperti korupsi, kekerasan, dan lain hal nya. (wawancara dengan Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) Bidang Eksekutif PAN Riau Zulmizan, 7 Juni 2014 di resto Hotel Pangeran Pekanbaru, 16.00 WIB)”

PKS memutuskan untuk mendukung Jon Erizal karena PKS melihat dukungan sosial Jon Erizal yang bersih dari masalah hukum, dan merupakan pengusaha nasional yang memulai karir politiknya dengan baik sehingga dapat menjadi Bendahara Umum PAN, dibanding dengan Syamsurizal yang memiliki pengalaman politik yang sudah banyak namun karena adanya dugaan Syamsurizal terlibat kasus korupsi PON di Riau membuat PKS lebih menjatuhkan pilihan kepada Jon Erizal.

Begitulah syarat normatif yang akan diberikan PKS kepada calon yang akan diusungnya pada pemilihan Kepala Daerah Riau tahun 2013. Dari semua syarat yang diberikan Jon Erizal dapat memenuhinya dengan baik.

3. Adanya Kesamaan Visi dan Misi
PKS dan Jon Erizal mempunyai visi dan misi yang sama yaitu membangun kemandirian Riau

kedepan. Tidak mengganggu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan menarik perhatian pusat agar memberikan lebih banyak dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke Riau. Sebagai bakal calon Kepala Daerah, Jon Erizal akan membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baik dan sehat agar memberikan keuntungan, karena Riau memiliki banyak potensi alam yang dapat dikembangkan.

4. Karakter Jon Erizal Sesuai Dengan Keinginan PKS

PKS menganggap selain memenuhi tiap persyaratan yang diajukan, penilai karakter sangat penting dilakukan. PKS memiliki standar penilaian tersendiri, penilaian karakter ini dilakukan PKS tanpa sepengetahuan dari bakal calon, tujuannya agar setiap bakal calon bersikap seperti biasa sesuai karakter mereka selama ini, tidak dibuat-buat untuk mendapat simpati dari pihak PKS. Menurut Sekretaris Umum PKS, Suroyo mengatakan :

“Kami mempunyai penilaian tersendiri, tidak hanya melihat apakah bakal calon sudah memenuhi syarat yang telah diajukan PKS, tapi kami juga melihat bagaimana sikap perilaku calon yang akan kami dukung. Sudah sesuai apa tidak dengan yang PKS inginkan, jangan hanya tampak didepan baik tapi dibelakangnya tidak. (wawancara dengan Sekretaris Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suroyo, 21 Juni 2013 di Kantor Markas Dakwah DPW Riau, 10.00 WIB)”

Dari hasil penilaian yang dilakukan, karakter Jon Erizal paling sesuai dengan keinginan PKS karena:

- a. Tidak pernah terlibat dalam masalah hukum.
- b. Memiliki sifat yang religius dan amanah.
- c. Mengikuti proses rekrutmen sesuai dengan alurnya.
- d. Santun dan tidak bersikap mengatur.

Proses rekrutmen yang dilakukan PKS harus dilewati oleh setiap bakal calon Kepala Daerah, ini merupakan syarat utama yang harus diikuti jalannya. Terpilihnya Jon Erizal sebagai bakal calon yang akan didukung PKS pada pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2013, sudah menjadi akhir dari proses rekrutmen bakal calon Kepala Daerah yang dilakukan oleh PKS.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah Provinsi Riau Oleh Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013, maka dapat disimpulkan:

1. Dalam merekrut bakal calon kepala daerah, PKS mengajukan 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon, yaitu : dukungan politik, dukungan finansial dan dukungan sosial.
2. Pada pemenuhan dukungan finansial, PKS tidak menetapkan jumlah dana kepada bakal calon Kepala Daerah seperti yang diisukan diluar, melainkan PKS mengajukan proposal yang berisi program kemenangan.
3. Dari 5 (lima) bakal calon yang diseleksi, PKS menetapkan memberikan dukungan kepada Jon

Erizal untuk maju pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Firmanzah, Mengelola Partai Politik, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Haris, Samsuddin, Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Maleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.
- Muhtadi, Burhanuddin, Dilema PKS Suara dan Syariah, PT. Gramedia, Jakarta, 2012.
- Mulyana, Deddy, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Ndraha, Taliziduhu, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Patilima, Hamid, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Rush, Michael dan Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ramlan, Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1999.

Sumber Bacaan Lain

Amin, Raja Muhammad. 2005. Rekrutmen Politik Dalam Penetapan Calon Anggota DPRD Propinsi Riau kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera : Tesis. Program Pascasarjana Universitas Riau.

Fahrurozi, Muhammad. 2012. Rekrutmen Politik Bakal Calon Kepala Daerah Dan Kepala Daerah Oleh Partai Keadilan Sejahtera Di Kota Pekanbaru Tahun 2011 : Skripsi S1. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau.

Penelitian Ali Yusri dan Adlin tahun 2013. Pola Rekrutmen Calon Legislatif Tingkat Kabupaten Dan Kota Oleh Enam Partai Politik Di Riau Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 (Studi Pada Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, PPP, PAN, dan PKS).

Harian Riau Pos, 15 November 2012. Haluan Riau tanggal 20 Desember 2012.

Media Riau Terkini, 1 Maret 2012.